

THE INFLUENCE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS FOR LENDING AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION SAK ETAP IN THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) IN PEKANBARU CITY

Gusnardi, Jawanri Citra PS & Fenny Trisnawati
Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Riau
Email: gusnardi.akuntan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of the quality of the financial reports of the credit giving and the prospect of the implementation of financial accounting standards entities without public accountability (SAK ETAP) on SMEs in the Pekanbaru City. The research data obtained from questionnaires were returned and interviews to 100 SMEs in the Pekanbaru City. These results indicate that the quality of financial reports SMEs do not influence the amount of credit received by SMEs. This is caused by the low quality of financial reports of SMEs so that banks are still doubt of the relevance and reliability of financial reporting SMEs. The prospect implementation for SMEs in improving the quality of financial reports is limited because of the lack of understanding SMEs on SAK ETAP.

Keywords: Quality of Financial Reports, SMEs, SAK- ETAP

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh pertumbuhan investasi dari dalam negeri dan luar negeri telah melahirkan berbagai macam jenis usaha dalam pengelolaan sumber daya yang ada dikandung bumi pertiwi ini. Hal ini juga tak terkecuali karena berkembang pesatnya UKM di Indonesia. Sumbangsih UKM sangat besar terhadap aktivitas perekonomian di Indonesia terutama di kota-kota besar dan daerah. Kontribusi segmen UKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia sangat besar. Saat ini ada 56 juta unit UKM di Indonesia dan mampu memberikan kesempatan kerja kepada 15 juta orang setiap tahunnya.

Sebagai negara berkembang, sumbangsih UKM terhadap pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya berasal dari aktivitas UKM. Sampai tahun 2011 kontribusi UKM terhadap PDB adalah sekitar 60% atau sekitar 4 triliun. Bukan hanya dari segi PDB, kontribusi UKM juga terlihat dari besarnya penerapan tenaga kerja di Indonesia. Hingga tahun 2012 UKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak lebih kurang 107 juta jiwa atau sekitar 97,3%. Pengembangan UKM juga ditujukan untuk mengurangi angka pengangguran dari 7,1% menjadi 5-6%. Hal yang sama juga diharapkan pada angka kemiskinan (www.depkop.go.id).

UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian nasional maupun daerah. UKM sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat ukm juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu ukm juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar.

Kondisi UKM secara nasional ini sangatlah menyedihkan jika tidak dapat bersaing dipasar internasional. Melalui Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah telah banyak memberikan perhatian terhadap UKM yang ada. Namun, kendala yang ada saat ini yang paling banyak ditemukan adalah banyaknya UKM yang belum bersentuhan dengan dunia perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya.

Menurut Ali Yong, Direktur SME dan *Wholesale Banking* bank Danamon, dari sekitar 55 juta unit UKM, baru sekitar 20 juta saja yang memiliki rekening perbankan (<http://www.danamon.co.id>).

UKM yang ada di daerah baik perkotaan ataupun yang ada dipedesaan pada hakikatnya mempunyai kelemahan yang sama yaitu manajemen dan pengelolaan keuangannya belum maksimal. Laporan keuangan UKM banyak yang tidak dibuat. UKM masih banyak yang melakukan perhitungan dengan selisih antara pengeluaran dan penerimaan saja. Oleh karena itu, perhitungan labanya belum jelas. Salah satunya, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) meminta para pelaku UKM disiplin dalam menyusun laporan keuangan. Pasalnya, selama ini kebanyakan pelaku UKM tidak punya laporan keuangan. "UKM-UKM itu belum pada disiplin buat laporan keuangan jadi masih berantakan, makanya coba disusun laporan keuangan agar penarikan pajaknya berdasarkan profit.

Kota Pekanbaru yang juga merupakan Ibu kota Provinsi Riau ini, memiliki UKM yang sangat berkembang pesat. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya usaha-usaha baru yang muncul di kota Pekanbaru dengan berbagai macam karakteristik usaha. Sepanjang tahun 2008, kota Pekanbaru memiliki UKM sebanyak 67.728. Jumlah tersebut terbanyak diantara 11 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau, 67.728 UKM di Pekanbaru tersebut bergerak di hampir seluruh lini usaha. Namun ada 4 lini dengan jumlah UKM terbesar yang bergerak di sektor yang sama, yaitu produksi (2.042 UKM), perdagangan (12.345 UMKM), jasa (3.145 UKM) dan industri (1.795 UKM) dan sektor lainnya sebanyak 48.402 UKM," (H-we:2009)

Penyediaan fasilitas dan akses oleh Pemerintah Kota Pekanbaru juga sangat mendukung perkembangan UKM. Pembiayaan UKM dapat diapresiasi dan sangat perlu ditingkatkan untuk mendorong kemajuan UKM dalam meningkatkan aktivitas perekonomian. Namun, pembiayaan UKM banyak yang terkendala karena kurangnya informasi keuangan yang dibutuhkan kreditor sebagai pertimbangan untuk memberikan pinjaman baik oleh perbankan maupun pemerintah melalui pinjaman lunak. Keadaan inilah yang sering dialami oleh pelaku UKM yang menjadi salah satu bagian yang sulit dalam melakukan pengembangan usaha karena pihak perbankan sangat membutuhkan laporan keuangan yang jelas untuk mengetahui kelayakan usahanya.

SAK ETAP adalah standar keuangan yang digodok oleh IAI, yang didesain khusus sesuai dengan kondisi pelaku-pelaku usaha kecil menengah yang ada di Indonesia. SAK ETAP juga standar keuangan yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami oleh berbagai kalangan pelaku usaha. Sehingga tak ada lagi alasan bagi pelaku-pelaku usaha untuk tidak membuat laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, UKM yang belum pernah membuat laporan keuangan agar termotivasi untuk membuatnya. Laporan keuangan yang baik bukan untuk mendapatkan pinjaman saja namun menjadi bahan pertimbangan utama dalam menilai kelayakan suatu usaha, sehingga pihak manajerial atau pelaku usaha dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat. Oleh karena itu, sangat menarik jika informasi keuangan UKM yang ada di kota Pekanbaru diteliti untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan tersebut berpengaruh pada besaran kredit yang diterima oleh UKM dari Perbankan, dan bagaimana prospek Implementasi SAK ETAP terhadap UKM yang ada di kota Pekanbaru ini.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rizki Rudiantoro dan Sylvia Veronica Siregar (2011) mengenai Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK-ETAP. Namun, dalam penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu usaha mikro tidak termasuk dalam variabel penelitian ini. Sehingga penelitian ini hanya berfokus pada Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kota Pekanbaru.

KAJIAN PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas harus memenuhi beberapa criteria atau persyaratan. Kualitas pelaporan keuangan sangat berkaitan erat dengan kinerja perusahaan yang diwujudkan dalam laba perusahaan yang diperoleh pada tahun berjalan. Pelaporan keuangan dikatakan tinggi (berkualitas) jika laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan dimasa yang akan datang (Lev dan Thiagarajan,1993; Richardson *et.al.*2001; Penman dan Zhang,2002; Beneish dan Vargus,2002; Richardson,2003) atau berasosiasi secara kuat dengan arus kas operasi di masa yang akan datang (Dechow dan Dichev,2002 dan Cohen,2003).

Laporan keuangan yang berkualitas dapat juga ditentukan apabila laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dalam hal ini untuk UKM harus merujuk kepada SAK ETAP, apakah UKM sudah menerapkan standard dan prinsip penyusunan laporan keuangan dalam SAK ETAP.

Laporan Keuangan UKM

Definisi laporan keuangan menurut Kieso, (2012) laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas (Raja Adri : 2012). Laporan keuangan akan menyajikan kondisi keuangan yang ada pada suatu usaha atau perusahaan. Oleh karena itu setiap entitas sangat diharapkan untuk menyajikan laporan keuangannya untuk mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Sehingga, pihak manajerial dapat mengambil keputusan untuk pengembangan ataupun untuk mempertahankan usaha tersebut.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari serangkaian kegiatan akuntansi dari suatu perusahaan, yang mana nantinya laporan keuangan tersebut akan dimanfaatkan oleh banyak pihak, baik pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan itu sendiri.

Banyak UKM dapat berjalan normal tanpa dukungan informasi keeuangan yang memadai. Mereka dapat berhasil tanpa laporan keuangan yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan hanya didasarkan pada intuisi dan kebiasaan yang berasal dari pengalaman sebelumnya.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha kecil dan menengah merupakan satuan entitas usaha yang bergerak diberbagai lini usaha yang saat ini banyak dijumpai di tengah masyarakat Indonesia. Ada banyak perbedaan dalam mengkaji defenisi UKM. Namun di Indonesia definisi UKM telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 sebagai berikut: 1) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian bak langsung maupun tak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini, dan 2) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri baik yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya UKM, dikelompokkan dalam ukuran usaha (pasal 6) sebagai berikut ini: 1) Usaha kecil itu memiliki asset diantara Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000 dan Omsetnya Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2,5 milyar sedangkan, dan 2) usaha menengah itu memiliki asset Rp 500.000.000 – Rp 10 milyar dan omsetnya Rp 2,5-50 milyar (KemenKop dan UKM : 2009).

Definisi usaha kecil dan menengah memang masih sangat beragam sehingga belum dapat diterima secara universal. Definisi usaha kecil dan menengah dalam mencapai tujuan penelitian ini mengacu pada pengelompokan usaha berdasarkan skala usaha yang ditetapkan oleh BPS (2011). Hal ini dikarenakan BPS mengklasifikasikan usaha secara tegas dengan membagi usaha kedalam tiga skala yaitu usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Badan Pusat Statistik mengelompokkan usaha berdasarkan jumlah karyawanya seperti tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Kriteria Jenis Usaha Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

Jenis usaha	Usaha kecil	Usaha menengah	Usaha besar
Jumlah tenaga kerja	1-19 orang	20-99 orang	>99 orang

Sumber : Badan Pusat Statistik (2011)

Kelompok usaha kecil menengah ini sangat banyak terdapat di Indonesia dan merupakan salah satu penyumbang PDB nasional terbesar. Usaha Kecil Menengah telah hadir sejak zaman sebelum kemerdekaan di Indonesia dengan berbagai karakteristik usaha yang pada umumnya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan sekarang sudah banyak juga yang orientasi ekspor. Selain itu, UKM juga banyak menghasilkan produk unggulan daerah dan menjadi identitas suatu wilayah, contohnya, usaha kerajinan kain songket asli Riau menjadi salah satu produk unggulan kota Pekanbaru.

Hipotesis :

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan:

- H1 = Kualitas laporan keuangan UKM yang ada di kota Pekanbaru berpengaruh terhadap besaran pinjaman yang disetujui oleh perbankan.
- H2a = Pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha UKM terkait SAK ETAP,
- H2b = Latar belakang pendidikan pengusaha berpengaruh terhadap pengetahuan pengusaha UKM terkait SAK ETAP,
- H2c = Jenjang pendidikan terakhir pengusaha berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha UKM terkait SAK ETAP

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis UKM yang terdapat di kota Pekanbaru. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru periode 31 desember tahun 2011, jumlah UKM yang ada di Kota Pekanbaru yaitu usaha kecil 1.937 unit dan usaha menengah 694 unit. Dalam penelitian ini usaha mikro tidak termasuk dalam variabel penelitian. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Dikelola oleh pemiliknya sendiri
- b. Memiliki sedikitnya 2 atau lebih karyawan (termasuk pemilik)
- c. Memiliki umur usaha sedikitnya 2 tahun
- d. Baik pemilik maupun karyawan bersedia diwawancarai

Adapun cara untuk penarikan sampelnya adalah dengan *simple random sampling* yaitu penarikan sampel dengan cara random namun tetap mendasarkan pada kriteria populasi dan karakteristik sampel sesuai dengan kerangka konsep dalam penelitian (Sidik : 2009 : 168). Sedangkan Ukuran sampelnya ditetapkan berdasarkan rumus Taro Yamane, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + \frac{N \cdot e^2}{k^2}}$$

$$n = \frac{2631}{1 + \frac{2631 \cdot (0.01)^2}{96^2}} = 96,33, \text{ (dibulatkan) } = 96$$

Oleh karena itu, jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini minimal 96 responden pemilik UKM. Namun dalam penelitian ini, jumlah sampel yang akan diambil untuk diteliti dikenakan menjadi 100 unit UKM.

Pengumpulan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dilakukan dengan : 1) Observasi, 2) Wawancara, DAN 3) Dokumentasi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi masing-masing variabel. Pengukuran statistic deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16.

Data yang dikumpulkan didapatkan melalui hasil wawancara kepada responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung terhadap responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian data dianalisis secara deskriptif untuk dapat membuat kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan dan hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Kualitas Laporan Keuangan Usaha Kecil Menengah

Kualitas laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang dibuat pengusaha UKM dimana kualitas laporan keuangan dinilai berdasarkan sejak pelaku UKM melakukan pembukuan akuntansi atau tidak, ada tidaknya divisi atau pegawai khusus terkait dengan pembukuan dan pelaporan keuangannya, kemudian rutin atau tidaknya pembukuan transaksi serta pelaporan keuangan yang dibuat dan juga dinilai berdasarkan komponen laporan keuangan apa saja yang disajikan.

Berikut ini tabel mengenai kualitas laporan keuangan UKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 2
Indikator Kualitas Laporan Keuangan UKM

No.	Keterangan	Ya	Tidak	Jumlah
1	Pencatatan transaksi keuangan usaha	84%	16%	100%
2	Memiliki pegawai khusus akuntansi	10%	90%	100%
3	Melakukan pencatatan transaksi secara rutin	61%	23%	84%
4	Mengetahui standar akuntansi keuangan	10%	90%	100%

Sumber : Data olahan hasil penelitan (2014)

Pembukuan Atau Pencatatan Transaksi Keuangan

Pembukuan atau pencatatan transaksi keuangan perusahaan merupakan salah satu proses penting dalam membuat suatu laporan keuangan usaha. Pembukuan atau pencatatan transaksi usaha adalah mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Biasanya, transaksi yang perlu dicatat adalah transaksi yang berhubungan dengan kas, pembelian (tunai atau kredit), penjualan, piutang dan utang. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari lapangan (tabel 1.1) yang diatas, ditemukan bahwa masih ada pelaku UKM yang tidak melakukan pencatatan akuntansi sedikit pun yaitu sebesar 16% responden mengaku tidak melakukan pembukuan atau pencatatan akuntansi sedikitpun. Responden tersebut menyatakan bahwa usaha yang sedang digelutinya tersebut belum membutuhkan akuntansi.

Pelaku usaha UKM yang tidak melaksanakan pembukuan dan pencatatan transaksi keuangan mengaku hanya mengandalkan daya ingatnya sendiri mengenai transaksi bisnis yang telah dilakukannya. Selain itu, pelaku usaha tersebut juga menjalankan aktivitas usahanya tanpa mengetahui persis berapa total kas dan laba usaha yang diperoleh dalam suatu periode waktu tertentu.

Senada dengan hasil penelitian Rudianto dan Sylvia (2011) dan data yang didapatkan dari lapangan bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami para pengusaha UKM dalam pembukuan akuntansinya. Kendala tersebut antara lain:

1. Pelaku UKM masih sulit membedakan antara transaksi keuangan pribadi dan transaksi keuangan usaha. Oleh sebab itu, pelaku usaha harus mampu konsisten dan disiplin dalam membedakan mana komponen pengeluaran pribadi dan mana komponen yang merupakan pengeluaran usaha.
2. Pelaku UKM kurang rajin melakukan pembukuan, pencatatan transaksi keuangan harian, termasuk dokumentasi bukti-bukti transaksi. Hal ini mengakibatkan pengusaha sulit untuk menyajikan laporan keuangan usahanya secara detail dan akuntabel.
3. Kesibukan usaha yang membuat pembukuan transaksinya menjadi sering terlupakan, apabila sudah menjelang sore pengusaha mengaku sudah enggan untuk melakukan pencatatan karena factor lelah
4. Latar belakang pendidikan pengusaha 71 % responden bukan dari bidang Akuntansi, Ekonomi maupun Manajemen atau tata buku yang membuat pemahamannya tentang akuntansi menjadi terbatas dan rendah.

UKM yang mempekerjakan karyawan khusus untuk bidang Akuntansi

Tidak adanya staf atau pegawai yang paham akan akuntansi, hal ini juga membuat UKM sulit untuk menyajikan laporan keuangan. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa dari total responden yang diteliti hanya 10% UKM yang memiliki pegawai atau karyawan khusus bertugas untuk menjalankan proses akuntansi usahanya sedangkan responden lainnya yang membuat laporan keuangannya dengan sendirian dengan cara mendokumentasikan bukti-bukti transaksi usaha. Tidak bisa dipungkiri, jika UKM memiliki karyawan khusus yang bertugas dalam bidang akuntansi, hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk membuat pencatatan transaksi keuangan menjadi tertib dan disiplin, sehingga akan dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih baik dan berkualitas. Namun, jika pengusaha UKM hendak mempekerjakan staf khusus akuntansi, hal ini dianggap menjadi beban karena membutuhkan biaya yang lebih. Oleh karena itu, bagi sebagian UKM masih sulit untuk melakukan pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian I Made Narsa (2012) yang menyatakan bahwa masih sedikit UKM yang memiliki pegawai khusus untuk dipekerjakan dibidang akuntansi dan pelaporan

keuangan. Sehingga kualitas laporan keuangan usaha yang disajikan pun masih sangat sederhana.

Standar Akuntansi Keuangan Dalam Membuat Laporan Keuangan

Standar akuntansi keuangan merupakan standar keuangan yang menjadi acuan dan pedoman pelaku UKM dalam membuat laporan keuangan usahanya. Pada penelitian ini adapun pilihan jawaban yang diajukan yaitu, berdasarkan PSAK, aturan Perpajakan, aturan lainnya dan Tidak tahu. Namun, sangat disayangkan ternyata pengusaha yang sudah membuat laporan keuangan ini, 80% tidak mengetahui standar akuntansi keuangan yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan usahanya. Jadi, mayoritas laporan keuangan yang disajikan tersebut hanya sebatas untuk mengetahui besaran laba dan perputaran arus kas usahanya saja. Sedangkan 15% menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan tersebut sesuai dengan aturan perpajakan.

Komponen Laporan Keuangan yang Disajikan

Mayoritas pelaku usaha kecil menengah yang ada di kota pekanbaru, sudah melakukan aktivitas pencatatan akuntansi atau pembukuan setiap transaksi usahanya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 84% responden telah melakukan pencatatan transaksi keuangan (pembukuan transaksi) yaitu meliputi pendokumentasian bukti transaksi seperti Bon, faktur, kwitansi dan juga telah melakukan pembukuan secara sederhana. Namun, dari 84% responden tersebut tidak semua rutin melakukan pencatatan akuntansi. Kemudian tidak semua Pelaku UKM tersebut mampu membuat laporan keuangan usahanya. Alasan responden tersebut tidak membuat laporan keuangannya karena pelaku usaha tersebut tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai cara membuat laporan keuangan.

Tabel 3
Komponen Laporan Keuangan yang disajikan UKM

No.	Komponen Laporan Keuangan	Frekuensi (unit)	Persentase (%)
1	A + B + C + D + E	1	1
2	A + B + C + E	6	6
3	A + C + D + E	1	1
4	B + C + D + E	1	1
5	A + C	3	3
6	B + C	32	32
7	B + D	1	1
8	C + D	6	6
9	B	1	1
10	C	29	29
11	0	19	19
Jumlah		100	100

Sumber : data olahan 2014

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa hanya 16 % responden yang tidak melakukan penyajian laporan keuangan akuntansi sama sekali. Sedangkan UKM yang sudah menyediakan laporan keuangan secara lengkap hanya 1% responden yaitu terdiri atas laporan laba-rugi, laporan arus kas, laporan posisi keuangan dan laporan perubahan modal. Selain itu, adapun UKM yang membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba-rugi dan laporan posisi

keuangan adalah sebesar 32% dari total responden. Berdasarkan tabel komponen laporan keuangan yang diatas dan mengutip pernyataan Ramli yang diatas diketahui bahwa UKM yang mampu membuat laporan keuangan lengkap adalah hanya 9% dari total responden dalam penelitian ini. Oleh karena itu, secara umum laporan keuangan yang disajikan UKM tersebut masih tergolong sangat rendah.

Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menyediakan laporan keuangan yang informatif memang masih sulit bagi sebagian besar pelaku UKM. Hal ini diakibatkan masih minimnya pengetahuan dan keterbatasan pemahaman akuntansi, rumitnya proses akuntansi dan tidak ada latar belakang pendidikan mengenai akuntansi oleh pelaku UKM. Selain itu, pelaku usaha yang tidak membuat pencatatan akuntansi mengaku bahwa akuntansi itu rumit dan sulit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UKM yang mengaku berhubungan dengan perbankan, menyatakan bahwa laporan keuangan UKM berpengaruh positif pada saat pengajuan kredit kepada pihak perbankan. Sebab, salah satu persyaratan perbankan yang akan menyetujui kredit usaha adalah apabila pelaku UKM tersebut memiliki laporan keuangan, setidaknya harus memiliki laporan laba-rugi dan neraca satu tahun terakhir. Namun, salah satu responden yang menggeluti usaha perdagangan dan hiburan ini mengatakan bahwa pihak bank juga melihat jaminan atas pinjaman yang diajukannya sebagai pertimbangan.

Laporan keuangan tersebut menjadi salah satu syarat administrasi untuk pihak perbankan guna mengetahui entitas tersebut sehat atau tidak, sehingga layak untuk diberikan kredit. Hal ini diperkuat dengan data yang menyatakan bahwa mayoritas pelaku UKM yang mengajukan pinjaman ke pihak perbankan tersebut memberikan jaminan atas pinjamannya tersebut. Maka sesuai dengan hipotesis yang diajukan H1 yaitu kualitas laporan keuangan UKM berpengaruh positif terhadap besaran kredit yang di setujui oleh pihak perbankan, dapat diterima. Sebab, apabila UKM memiliki laporan keuangan yang berkualitas dan disajikan dengan lengkap pihak perbankan akan lebih percaya untuk memberikan kredit.

Prospek Implementasi SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)

Penerbitan PSAK ETAP oleh DSAK-IAI ini adalah sebagai alternatif PSAK yang boleh diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik di Indonesia, sebagai bentuk PSAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK Umum yang lebih rumit. Kehadiran SAK ETAP diharapkan mampu membantu para pelaku usaha kecil menengah untuk membuat laporan keuangan yang lebih sederhana dan akuntabel. Standar ini telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2009 dan resminya berlaku pada tahun 2011. Dengan adanya standar akuntansi ini diharapkan entitas-entitas tanpa akuntabilitas publik mampu membuat laporan keuangannya sendiri. Sehingga dapat menjadi landasan untuk menetapkan pajak yang tepat oleh pemerintah. Selain itu, dengan kehadiran standar akuntansi ini juga diharapkan pihak pelaku Usaha kecil menengah akan lebih mudah untuk mengajukan pinjaman ke pihak perbankan karena telah memiliki laporan keuangan yang akuntabel.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan diketahui bahwa 87 % pelaku UKM tersebut mengaku tidak tahu tentang SAK ETAP. Keberadaan SAK ETAP belum banyak diketahui oleh pengusaha kecil menengah yang ada di kota Pekanbaru. Hal ini menyatakan bahwa pengusaha tersebut belum pernah mendengarkan informasi mengenai SAK-ETAP. Padahal, SAK-ETAP merupakan standar akuntansi terbaru bagi entitas tanpa akuntabilitas public yang salah satunya adalah untuk UKM. Para responden tersebut mengaku baru kali ini mendengarkan istilah SAK-ETAP ketika

peneliti menanyakan hal tersebut. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian dari Rudiantoro dan Sylvia (2011) yang menyatakan bahwa mayoritas responden penelitiannya yang belum mengetahui dan pernah mendengarkan SAK ETAP.

Tabel 4
Pengetahuan Terhadap SAK-ETAP Oleh Pengusaha UKM

No.	Responden	Frekuensi (unit)	Persen (%)
1	Tak tahu	87	87
2	Tahu	13	13
	Total	100	100

Sumber : Data olahan 2014

Hal yang sama juga terjadi pada penelitian terdahulu Auliyah (2013) ketika meneliti penerapan akuntansi berdasarkan SAK ETAP pada kampung batik di Sidoarjo, banyak pelaku UKM yang merasa terdengar asing ketika mendengarkan pertanyaan tentang SAK ETAP. Dari hasil wawancara lebih lanjut para pelaku UKM mengetahui SAK-ETAP melalui media internet dan media cetak. Namun, responden tersebut juga mengaku bahwa tidak satupun yang pernah mengikuti sosialisasi dan pelatihan terkait SAK ETAP tersebut. Artinya tidak ada satupun responden yang paham akan isi SAK ETAP tersebut.

Hal ini juga dipertegas bahwa mayoritas responden yang membuat laporan keuangannya belum mengetahui standar keuangan yang menjadi acuannya dalam membuat laporan keuangan dan laporan keuangan yang dibuat hanya sebatas pembukuan keuangan usaha, dengan tujuan untuk dapat mengetahui perputaran kas dan laba usaha yang diperolehnya.

Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, prospek implementasi SAK-ETAP di Kota Pekanbaru masih jauh dari yang diharapkan, padahal mengingat SAK-ETAP telah diterbitkan pada tahun 2011 yang lalu. Minimnya sosialisasi akan standar akuntansi keuangan ini sangat berpengaruh pada pengetahuan dan pemahaman pelaku UKM terhadap SAK-ETAP. Maka hipotesis H2a, pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UKM terkait SAK-ETAP tersebut dapat diterima. Namun, akibat minimnya sosialisasi tersebut hanya 13% responden yang mengetahui adanya SAK-ETAP tersebut. Untuk itu perlu dilaksanakan lagi sosialisasi dan pelatihan SAK-ETAP kedepannya oleh pihak-pihak yang terkait termasuk perguruan tinggi yang ada di kota ini.

Pada Hipotesis H2b yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan pengusaha berpengaruh positif terhadap pemahaman SAK-ETAP dapat diterima karena dari 13 responden yang mengaku mengetahui SAK-ETAP, dimana latar belakang pendidikan responden tersebut adalah bidang Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi.

Tidak jauh berbeda, Hipotesis H3b yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan terakhir pengusaha berpengaruh positif terhadap pemahaman UKM terkait SAK-ETAP dapat diterima karena jenjang pendidikan terakhir pengusaha sebagian besar adalah S1 hanya mengaku pernah mendengar SAK-ETAP saja. Dari 13 responden tersebut tingkat pendidikan terakhirnya adalah S1 (Strata 1). Namun, belum ada satupun responden yang mengaku cukup tahu atau paham akan isi SAK-ETAP tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan tidak berpengaruh signifikan akan pemahaman pengusaha UKM terkait SAK-ETAP tersebut.

Oleh karena itu, minimnya pengetahuan pelaku UKM mengenai SAK-ETAP membuat implementasi SAK-ETAP tersebut masih rendah di Kota betuah ini. Penelitian terdahulu Auliyah (2012) juga menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi informasi akan SAK ETAP menyebabkan minimnya pemahaman pelaku Usaha akan SAK ETAP tersebut. Prospek implementasi SAK-ETAP adalah diharapkan bisa menjadi acuan keuangan para pelaku UKM kedepannya, agar laporan keuangan UKM lebih informatif dan akuntabel. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa semua responden setuju bahwa laporan keuangan itu sangat penting bagi tumbuh kembangnya suatu usaha. Hal ini memberikan gambaran bahwa prospek implementasi SAK ETAP akan menjadi acuan utama dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas kedepannya. Rudiantoro (2011) juga menemukan hal sama, dimana mayoritas responden pelaku UKM yang ditelitinya setuju bahwa laporan keuangan itu penting dalam tumbuh kembangnya perusahaan. Ini menunjukkan bahwa UKM butuh SAK ETAP. Oleh sebab itu, peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi diharapkan mampu untuk membantu para pelaku UKM agar lebih memahami SAK-ETAP melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan akuntansi dan SAK ETAP kepada pelaku UKM tersebut.

Dalam penelitian Dita Purnama Sari (2013), menyatakan bahwa sosialisasi dan pelatihan akuntansi sangat berpengaruh terhadap pengetahuan pengusaha dalam membuat laporan keuangan yang baik. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan akuntansi sangat penting untuk digalakkan kembali baik oleh dinas koperasi dan UKM maupun perguruan tinggi sebagai salah satu institusi yang mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama akan SAK ETAP tersebut. Penelitian Rudiantoro dan Sylvia (2011), juga menyatakan bahwa mayoritas para pengusaha UKM juga menginginkan standar akuntansi keuangan yang baik untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, yaitu SAK ETAP. Jadi, dengan adanya peningkatan sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP tersebut diharapkan Prospek implementasi juga semakin meningkat di masa depan.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas Laporan keuangan UKM yang di Kota Pekanbaru masih tergolong sangat rendah. Masih banyak pelaku UKM yang belum membuat laporan keuangan usahanya. Hal ini menunjukkan Kualitas laporan keuangan yang disajikan masih sangat jauh dari standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu laporan keuangan yang disajikan hanya sebatas pembukuan biasa untuk mengetahui alur perputaran kas dan besarnya rugi atau laba yang diperoleh dalam waktu tertentu.
2. Sebanyak 52 % UKM sudah bersentuhan dan bermitra dengan pihak perbankan dan laporan keuangan yang dibuat para pelaku UKM berpengaruh terhadap kredit yang diajukan untuk disetujui oleh pihak perbankan.
3. Prospek implementasi SAK-ETAP di Kota Pekanbaru masih sangat rendah, hanya 13% responden yang tahu akan informasi SAK-ETAP dan tidak ada satu pun responden yang mengaku paham akan isi SAK ETAP tersebut.
4. Latar belakang dan jenjang pendidikan terakhir pengusaha UKM berpengaruh juga terhadap pemahaman Pelaku UKM terhadap SAK-ETAP. Hal ini diketahui dari 13 % responden yang mengaku mengetahui SAK-ETAP latar belakang pendidikannya berasal dari bidang Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi sedangkan jenjang pendidikan terakhir responden tersebut adalah tingkat S1.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Gunatri : 2013. http://www.google.co.id/?gws_rd=https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=DfpTVeLYHMS7mgXTj4CACg#q=pengembangan+usaha+belum+banyak+berfikir+Ayu+Gunatri+:+2013
- Dita Purnama sari, 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyediaan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil dan Menengah Di Kecamatan Rumbai Pesisir. Pekanbaru: Artikel ilmiah. Universitas Riau
- Dechow,P.&Dichev,I. 2002. The Quality o Accruals and Earnings:The Role of Accrual Estimation Errors. *The Accounting Review*.77, 35 59 (Supplement).
- I Made Narsa, dan Agus Widodo. 2012. Mengungkap Kesiapan UMKM Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Public (PSAK ETAP) Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Majalah Ekonomi*. Tahun XXII, No. 3 Desember 2012.
- lim Ma'rifatul Auliyah. 2012. Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP pada UKM Kampung Batik di Sidoarjo. Artikel ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011, Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) Nomor 8, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Indonesia. Volume 9- No. 1, juni 2012
- Kieso Donald E,Jerry J. Weygandt , Terry D. Warfield. 2014. *Intermediate Accounting* 14th edition. John Wiley & Sons, Inc.
- <http://www.depkop.go.id>. 2012.
- http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=344:statistik-ukm-2012&Itemid=93
- <http://www.danamon.co.id>. 2012.
- H-we:2009. <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=22922>. *Pekanbaru memiliki UMKM sebanyak 67.728*
- Lev, B, and SR Thiagarajan. 1993. "Fundamental Information Analysis", *Journal of Accounting Research*, 31(2), PP. 190-215.
- Penman, S., and X. Zhang. 2002. Accounting Conservatism, Quality of Earnings, and Stock Returns. *The Accounting Review* 77(2): 237-264.
- Ramli M. 2009. Buku Ajar Modul Latihan Praktek Akuntansi. Pekanbaru : Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau
- Rizki Rudiantoro dan Sylvia Veronika Siregar. 2011. Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. Paper disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi. Banda Aceh
- Richardson, S., I. Tuna and Min Wu. 2003. Capital market pressures and earnings management: The case of earnings restatements. Working paper: University of Pennsylvania.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2008. Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pd>